

Munculnya kebijakan tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang tertuang dalam PERMEN-KP No 2 Tahun 2015 (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015) tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets), akibat banyaknya ilegal fishing serta perusakan habitat laut di Indonesia seperti terumbu karang dan lain sebagainya. Aturan mengenai pelarangan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) bukanlah aturan baru yang serta merta dikeluarkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti, aturan tersebut keluar sebagai amanah dari Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan *juncto* Undang-Undang No 45 Tahun 2009, dimana dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan: *“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”*. Pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) merupakan salah satu dari alat tangkap yang sesuai sifatnya dikategorikan sebagai alat tangkap yang merusak lingkungan.

Konsekuensi yang harus diterima oleh para nelayan jika masih menggunakan alat tangkap ikan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yaitu penghentian operasi alat penangkapan ikan tersebut. Dengan munculnya PERMEN-KP No 2 Tahun 2015 tersebut akibatnya banyak masyarakat yang pro dan kontra. Di bawah ini merupakan bukti bahwa masyarakat terutama masyarakat nelayan dalam menanggapi atau

Selain itu, pada diagram batang di atas juga digambarkan mengenai respon masyarakat nelayan tentang adanya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) berdasarkan usia responden. Dalam hal ini, respon masyarakat nelayan yang tidak setuju dengan adanya kebijakan larang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) lebih didominasi pada usia 40-49 Tahun sebanyak 45 (45,9%), yang kemudian diikuti oleh usia 30-39 Tahun sebanyak 15 (15,3%), >50 Tahun sebanyak 13 (13,3%), 20-29 Tahun sebanyak 2 (2%), dan <20 Tahun sebanyak 0 (0%). Pada respon masyarakat nelayan yang setuju dengan adanya kebijakan larang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) lebih didominasi pada usia 30-39 Tahun sebanyak 5 (5,1%), yang kemudian diikuti usia 20-29 Tahun sebanyak 4 (4,1%), usia 40-49 Tahun sebanyak 3 (3,1%), usia >50 Tahun sebanyak 2 (2%), dan <20 Tahun sebanyak 0 (0%). Pada respon masyarakat nelayan yang sangat tidak setuju dengan adanya kebijakan larang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) lebih didominasi pada usia 40-49 Tahun sebanyak 4 (4,1%), yang kemudian diikuti usia >50 Tahun sebanyak 3 (3,1%), usia 30-39 Tahun sebanyak 2 (2%), usia 20-29 Tahun sebanyak 0 (0%), dan <20 Tahun sebanyak 0 (0%). Sedangkan yang merespon sangat setuju tentang adanya kebijakan larang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) tidak ada yang mendominasi karena dari semua usia tidak ada yang merespon sangat setuju.

diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan lebih didominasi oleh responden dengan tingkat pendidikan Tidak Sekolah / Tidak Tamat Sekolah yang sebanyak 29 (29,6%) responden yang kemudian diikuti oleh SD sebanyak 24 (24,5%), SLTP sebanyak 14 (14,3%), SLTA sebanyak 6 (6,1%), dan Perguruan Tinggi hanya sebanyak 2 (2%) responden saja. Kemudian, respon masyarakat nelayan yang setuju tentang adanya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets), lebih didominasi oleh responden dengan tingkat pendidikan SD yang sebanyak 6 (6,1%) responden yang kemudian diikuti oleh Tidak Sekolah / Tidak Tamat Sekolah sebanyak 5 (5,1%), SLTP sebanyak 3 (3,1%), SLTA 0 (0%), dan Perguruan Tinggi 0 (0%). Selanjutnya, respon masyarakat nelayan yang sangat tidak setuju tentang adanya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) lebih didominasi oleh responden dengan tingkat pendidikan Tidak Sekolah / Tidak Tamat SD sebanyak 4 (4,1%), kemudian diikuti SD sebanyak 2 (2%), SLTA 2 (2%), SLTP 1 (1%), dan Perguruan Tinggi 0 (0%). Yang terakhir respon masyarakat nelayan yang sangat setuju tentang adanya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) apabila diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan tidak ada yang mendominasi karena tidak ada yang menjawab sangat setuju.

berdasarkan penghasilan sebulan setelah diterapkannya kebijakan, didominasi oleh penghasilan Rp 1.001.000 – Rp 2.500.000 sebanyak 35 (35,7%) yang kemudian diikuti oleh Rp 501.000 – Rp 1.000.000 sebanyak 32 (32,7%), Rp 2.501.000 – Rp 5.000.000 sebanyak 7 (7,1%), Rp 100.000 – Rp 500.000 sebanyak 3 (3,1%) dan >Rp 5.000.000 sebanyak 0 (0%). Kemudian, respon masyarakat nelayan yang setuju tentang adanya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets), lebih didominasi oleh responden dengan penghasilan Rp 2.501.000 – Rp 5.000.000 sebanyak 5 (5,1%) yang kemudian diikuti oleh Rp 1.001.000 – Rp 2.500.000 sebanyak 3 (3,1%), >Rp 5.000.000 sebanyak 3 (3,1%), Rp 100.000 – Rp 500.000 sebanyak 1 (1%), dan Rp 501.000 – Rp 1.000.000 dan sebanyak 0 (0%). Selanjutnya, respon masyarakat nelayan yang sangat tidak setuju tentang adanya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) lebih didominasi oleh responden dengan penghasilan Rp 100.000 – Rp 500.000 sebanyak 4 (4,1%), kemudian diikuti Rp 501.000 – Rp 1.000.000 sebanyak 2 (2%), Rp 1.001.000 – Rp 2.500.000 sebanyak 2 (2%), Rp 2.501.000 – Rp 5.000.000 sebanyak 1 (1%), dan yang berpenghasilan dan >Rp 5.000.000 sebanyak 0 (0%). Selanjutnya respon masyarakat nelayan yang menjawab sangat setuju berdasarkan penghasilan sebulan setelah diterapkannya kebijakan sebanyak 0 (0%) orang.

Berdasarkan paparan data di atas, hal ini membuktikan bahwa mayoritas masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tidak setuju dengan adanya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls)

	memberikan fasilitas pengganti alat tangkap ikan yang dilarang.					
6	Setelah diberlakukannya kebijakan tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets), sekarang anda melaut menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.	1 (1%)	6 (6,1%)	48 (49%)	43 (43,9%)	98 (100%)

Berdasarkan tabel di atas untuk item pertanyaan nomor 4, dari 98 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 48 (49%) orang, setuju 38 (38,8%) orang, tidak setuju 11 (11,2%) orang dan sangat tidak setuju 1 (1%) orang. Dengan demikian maka masyarakat sangat setuju apabila penerapan kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets), berpengaruh pada berkurangnya penghasilan anda dalam 3 bulan terakhir. Untuk item pertanyaan nomor 5, dari 98 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 44 (44,9%) orang, setuju 42 (42,8%) orang, tidak setuju 9 (9,2%) orang dan sangat tidak setuju sebanyak 3 (3,1%) orang. Dengan demikian maka masyarakat sangat setuju apabila setelah diberlakukannya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets), Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan fasilitas pengganti alat tangkap ikan yang dilarang.

Sedangkan untuk item pertanyaan nomor 6, dari 98 responden yang menjawab setuju sebanyak 47 (48%) orang, sangat setuju 43 (43,9%) orang, tidak setuju 7 (7,1%) orang dan sangat tidak setuju sebanyak 1 (1%) orang. Dengan demikian maka masyarakat nelayan setuju jika setelah diberlakukannya kebijakan

(4,1%) orang. Dengan demikian maka masyarakat nelayan setuju jika kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik seine nets) berdampak positif bagi kelestarian laut. Untuk item pertanyaan nomor 8, dari 98 responden yang menjawab setuju sebanyak 48 (49%) orang, sangat setuju 38 (38,8%) orang, tidak setuju 9 (9,2%) orang dan sangat tidak setuju sebanyak 3 (3%) orang. Dengan demikian maka masyarakat nelayan setuju jika kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik seine nets) berpengaruh pada berkurangnya kemampuan masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Sedangkan untuk item pertanyaan nomor 9, dari 98 responden yang menjawab setuju sebanyak 46 (46,9%) orang, sangat setuju 43 (43,9%) orang, tidak setuju 6 (6,1%) orang dan sangat tidak setuju sebanyak 3 (3,1%) orang. Dengan demikian maka masyarakat nelayan setuju jika dengan adanya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik seine nets) diharapkan adanya pemberdayaan khusus bagi masyarakat nelayan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

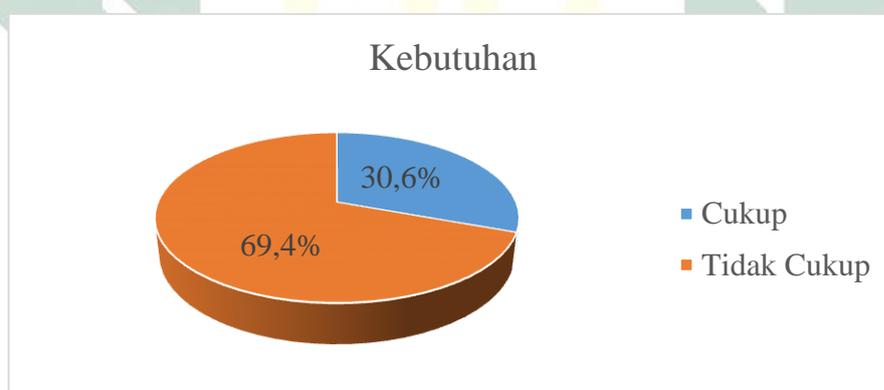
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban mayoritas tidak setuju dengan adanya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets). Meskipun demikian mayoritas dari masyarakat nelayan juga sempat setuju bahwa kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) adalah untuk menjaga kelestarian laut untuk masyarakat nelayan sendiri dan untuk anak cucu mereka nantinya.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 ini tidak serta merta muncul untuk merugikan masyarakat terutama masyarakat nelayan kecil atau nelayan buruh yang bekerja untuk tuannya akan tetapi yang sangat dirugikan dalam hal ini adalah para pemilik modal/pongawa/pemilik kapal/pemilik alat tangkap. Meskipun dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini berdampak langsung terhadap penghasilan nelayan kecil yang mengandalkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan, akan tetapi dampak tersebut hanya bersifat sementara dengan dampak panjangnya yaitu untuk menjaga ekosistem laut agar bisa dinikmati oleh masyarakat nelayan sendiri serta anak cucu mereka. Jika tidak diberlakukannya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat (hela) trawls) dan pukat tarik (seine nets) maka para pemilik modal akan sangat diuntungkan dengan jumlah hasil tangkapan yang melimpah yang mana nantinya bukan mensejahterakan para nelayan kecil akan tetapi akan lebih mensejahterakan para pemilik modal. Jika tetap menggunakan alat tangkap yang dilarang maka stok ikan masa depan akan habis dalam kurun waktu yang singkat.

Pola hubungan nelayan dalam struktur sosial sangat identik dengan kuatnya ikatan patron-klien. Pemilik modal/pemilik kapal sebagai patron, dan nelayan yang tidak memiliki modal ekonomi tetapi memiliki keahlian dan tenaga berperan sebagai klien. Hubungan patron-klien ini dapat dilihat dari ketergantungan sebagian besar nelayan penggarap kepada nelayan pemilik terutama pada musim paceklik. Hal ini dikarenakan akibat tidak adanya matapencaharian alternatif atau matapencaharian tambahan nelayan yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan, terutama saat hasil tangkap mulai menurun.

diperoleh masyarakat nelayan setelah diterapkannya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Jika kebutuhan dasar dan pendapatan masyarakat nelayan tidak seimbang atau dalam kata lain biaya kebutuhan lebih besar dibanding dengan pendapatan maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut tidak sejahtera. Dibawah ini akan disajikan data mengenai pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam 3 bulan terakhir sebagai jawaban dari rumusan masalah kedua yaitu kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tahun 2017 setelah diberlakukannya kebijakan.

Gambar 5.4
Pemenuhan Kebutuhan Sehari-Hari Dalam 3 Bulan Terakhir



Berdasarkan gambar diagram lingkaran di atas dari 98 responden dapat diketahui bahwa dalam tiga bulan terakhir penghasilan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan prosentase sebanyak 68 (69,4%) responden. Sedangkan yang merasa cukup sebanyak 30 (30,6%) responden. Disisi lain, prosentase pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam tiga bulan terakhir tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan karakteristik responden, yakni jenis kelamin dan

sebanyak 60 (61,2%) orang, sangat setuju 32 (32,7%) orang, tidak setuju 5 (5,1%) orang, dan sangat tidak setuju 1 (1%) orang. Untuk item pernyataan nomor 4, dari 98 responden yang menjawab setuju sebanyak 50 (51%) orang, sangat setuju 38 (38,8%) orang, tidak setuju 9 (9,2%) orang dan sangat tidak setuju 1 (1%) orang. Dengan diterapkannya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets), dalam melengkapi kebutuhan gizi, energi dan protein 4 sehat 5 sempurna (nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu) tidak lagi menjadi suatu yang wajib dalam pemenuhan makanan mereka sehari-hari dikarenakan penghasilan mereka yang sedikit dan masih banyak lagi kebutuhan yang lainnya. Terpenting bagi mereka adalah bisa tetap makan setiap harinya itu sudah lebih dari cukup.

Sedangkan dari item pertanyaan nomor 5, dapat diketahui bahwa masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dalam pemenuhan kebutuhan mereka semua bergantung pada penghasilan yang diperolehnya. Dibuktikan bahwa dari 98 responden yang menjawab setuju sebanyak 50 (51%) orang, sangat setuju 35 (35,7%) orang, tidak setuju 11 (11,2%) orang, dan sangat tidak setuju 2 (2%) orang. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa setelah diterapkannya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tahun 2017. Karena alat tangkap yang mereka gunakan untuk melaut disetiap harinya dilarang, akhirnya mereka mengganti dengan alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan dan hasil tangkapan yang diperoleh tidak sebesar atau sebanyak saat

menggunakan alat tangkap ikan trawls/seine nets. Dengan berkurangnya hasil tangkapan ikan mempengaruhi pada penghasilan mereka di setiap bulannya.

Berdasarkan paparan di atas kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban termasuk dalam kategori sejahtera ketika belum diberlakukannya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) dan kesejahteraan tersebut terpenuhi. Dibuktikan dengan penghasilan masyarakat nelayan sebelum diterapkannya kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) yakni dari 98 responden yang berpenghasilan Rp 1.001.000 – Rp 2.500.000 sebanyak 46 (46,9%) orang, Rp 2.501.000 – Rp 5.000.000 sebanyak 28 (28,6%) orang, Rp 501.000 – Rp 1.000.000 sebanyak 14 (14,3%) orang, > Rp 5.001.000 sebanyak 10 (10,2%) orang, dan penghasilan Rp 100.000 – Rp 500.000 sebanyak 0 (0%) orang.

Akan tetapi, ketika mulai diterapkannya kebijakan PERMEN-KP No.2 tahun 2015 di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang awalnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka mayoritas selalu tercukupi menjadi banyak yang tidak tercukupi. Dibuktikan dengan dalam tiga bulan terakhir penghasilan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan prosentase sebanyak 68 (69,4%) responden. Sedangkan yang merasa cukup sebanyak 30 (30,6%) responden.

Jika berdasarkan standart UMK (Upah Minimum Kabupaten) Kabupaten Tuban sebesar Rp 1.901.952,50, nelayan yang penghasilannya di bawah UMK sebanyak 72 (73,5%) orang dari 98 responden. Kemudian jika diklasifikasikan

Dari diagram lingkaran di atas dapat dilihat bahwa status kepemilikan rumah masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban berstatus milik sendiri sebanyak 98 (100%) orang. Sedangkan yang rumah mereka berstatus tidak milik sendiri sebanyak 0 (0%) orang.

C. Pengaruh Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Tahun 2017

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) (variabel X) terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Tahun 2017 (variabel Y), maka peneliti mengawalinya dengan membuat tabel tabulasi di masing-masing variabel. Lebih lanjut, setelah membuat tabel tabulasi tersebut, peneliti selanjutnya menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS versi 16.0 yang nantinya akan menghasilkan *Descriptive Statistic, Correlation, Coefficients, dan Model Summary*.

Pada hasil output *Descriptive Statistic*, menunjukkan bahwa rata-rata (mean) Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) (Independent) bernilai 30,09 yang diperoleh dari jumlah responden (N) sebanyak 98 orang dengan standart deviasi 2,762, sedangkan rata-rata (mean) Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Tahun 2017 (Dependent) bernilai 28,55 yang diperoleh dari jumlah responden (N) sebanyak 98 orang dengan standart deviasi 3,136.

0,1 (10%) dan pengujian dilakukan dengan menggunakan uji dua pihak atau arah, maka harga t tabel diperoleh 1,658. Berdasarkan harga t hitung dan harga t tabel tersebut, maka $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($6,818 > 1,658$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tahun 2017. hal ini berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak
- Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_a di tolak

Jadi, dari ketentuan tersebut dapat diperoleh pengertian koefisien regresi kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine net) bernilai signifikan. Signifikansi tersebut mempunyai nilai cukup kuat sesuai dengan interpretasi koefisien yang menyatakan nilai korelasi 0,571 termasuk pada kategori cukup kuat.

Hasil output SPSS versi 16.0 dengan teknik regresi linier sederhana yang terakhir adalah mengenai *Model Summary* yang nantinya untuk mengetahui berapa persen (%) tingkat pengaruh antara variabel X tentang kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) terhadap variabel Y mengenai kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Plang Kabupaten Tuban tahun 2017. Adapun hasil yang ditunjukkan bahwa hasil R Square adalah 0,326, angka tersebut diperoleh dari hasil pengkuadratan dari harga koefisien korelasi, yakni $0,571 \times 0,571 = 0,326$. R Square bisa disebut juga dengan koefisien determinasi yang mempunyai arti 32,6% variabel kesejahteraan

masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tahun 2017 dipengaruhi oleh kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets), sedangkan sisanya 67,4% dipengaruhi oleh faktor lain.

Berdasarkan paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup kuat antara kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tahun 2017. Suatu masyarakat bisa dikatakan sejahtera yaitu jika mampu memenuhi 3 aspek kesejahteraan yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangan. Selain ciri-ciri kesejahteraan di atas, juga terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat diantaranya dari faktor intern (jumlah anggota keluarga, tempat tinggal, keadaan sosial ekonomi keluarga, dan keadaan ekonomi keluarga) dan faktor ekstern (faktor manusia, faktor alam, dan faktor ekonomi keluarga).

Dalam penelitian ini, kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tahun 2017 setelah diberlakukannya kebijakan yang berkaitan erat dengan kebutuhan dasar, maka termasuk dalam kategori tidak sejahtera dan faktor yang banyak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tahun 2017 diantaranya adalah faktor intern yakni jumlah anggota keluarga dan keadaan ekonomi keluarga. Dengan dilarangnya penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) dapat mempengaruhi penghasilan masyarakat nelayan di

